

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dua dimensi yang tak dapat dipisahkan dalam pengembangan sumber daya manusia adalah peningkatan kualitas secara fisik, yang meliputi peningkatan kualitas kesehatan dan kebugaran jasmani serta upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat. Di sisi lain adalah kualitas nonfisik, sebagai usaha yang ditujukan bagi peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, pengembangan mental spiritual, peningkatan etos kerja serta peningkatan kadar produktivitas kerja.

Kedua dimensi ini membentuk arah kebermaknaan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang seimbang antara peningkatan kualitas fisik / material dengan kualitas spiritual. Sehingga upaya ideal untuk mengupayakan masyarakat mempunyai pendidikan yang berkualitas, peningkatan kesejahteraan dan terbebas dari belenggu kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan untuk hidup layak di lingkungan masyarakat, yang melaju mengikuti arus perkembangan teknologi serta sosial budaya pada saat ini.

Upaya ke arah peningkatan kualitas sumber daya manusia telah dijadikan acuan dalam berbagai program pembangunan di negara kita, bahkan jauh sebelumnya yakni dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah menjadi fokus perhatian yang tak kalah pentingnya adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kalimat ini memiliki makna yang jauh mempunyai visi kedepan, sangat urgen dalam tahapan tatanan pembangunan bangsa mengikuti arus globalisasi, tuntutan untuk memiliki sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas adalah amanat bangsa.

Perwujudannya dalam pengembangan sumber daya manusia adalah pada sisi nonfisik, yaitu pada sektor pendidikan. Pendidikan akan mempersiapkan kader bangsa ini agar berkualitas. Pendidikan dilaksanakan sejak manusia dilahirkan hingga manusia itu masuk ke liang kuburnya, dengan kata lain pendidikan berlangsung sepanjang hayat. Dalam lingkungan keluarga anak mulai pertama dan utama mengenyam pendidikan yang biasa diistilahkan dengan pendidikan informal, di lingkungan keluarga ini seorang manusia pertama kali belajar atau mengalami proses pembelajaran.

Selanjutnya seorang anak manusia akan memasuki dunia luar, dan ia akan mengikuti proses pembelajaran dalam pendidikan formal dan nonformal. Dalam pendidikan formal akan dimulai pemberdayaan sumber daya manusia tersebut dalam jenjang perjenjang. Pendidikan nonformal dapat menjadi pelengkap, ataupun pengganti pendidikan formal tersebut, sehingga sumber daya manusia tersebut berdaya.

Proses pendidikan dalam konteks pemberdayaan sumber daya manusia ini, di Indonesia dikenal dengan istilah tripusat pendidikan, yaitu informal, formal dan nonformal. Ketiga pusat pendidikan tersebut memiliki wacana masing-masing yang bila dilaksanakan secara terpadu akan menjadi sebuah kekuatan yang kokoh dalam pemberdayaan sumber daya manusia.

Di negara kita ini telah termaktub dengan jelas dalam undang-undang tentang sistem pendidikan di Indonesia, bahwa pendidikan berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat yang lebih dikenal dengan pendidikan informal, formal dan nonformal. Ini menjadi amanat bangsa untuk mempersiapkan generasi ke generasi yang terus berkembang, mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Amanat ini juga dimaktubkan dalam ajaran agama Islam yang mengutamakan untuk belajar, lebih dikenal "Iqra".

Realisasi amanah ini salah satunya tergambar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 sebagai hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan penjelasan mengenai pengertian pendidikan secara umum yaitu merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini memperjelas bahwa pendidikan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal, dalam aplikasinya dapat saling melengkapi dan memperkaya. Ketiga jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional tersebut secara implisit telah memberikan pemahaman filosofis sebagai suatu kewajiban kita dalam pembangunan untuk selalu antisipatif terhadap perkembangan sumber daya manusia yang kita miliki terhadap berbagai perubahan karakter dan kualitas interaksi manusia di dunia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menuntun manusia untuk selalu melakukan aktifitas pendidikan, peningkatan kualitas dalam rangka mengantisipasi segala kemungkinan perubahan di masa yang akan datang. Salah satu bentuknya adalah dituangkan dalam pemberian layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan memiliki kesinambungan dengan dunia kerja atau link and match.

Jalur pendidikan formal sebagai suatu jalur pendidikan yang diselenggarakan di lembaga pendidikan / sekolah dengan sistem berjenjang dan berkesinambungan diatur dalam pasal 14 terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sedangkan jalur pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan informal sebagaimana tertuang dalam pasal 27 yaitu kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Yang membedakan antara pendidikan formal, nonformal, dan informal adalah sistem berkenaan dengan waktu dan lama belajar, usia peserta belajar, isi pelajaran, cara penyelenggaraan pengajaran dan cara penilaian hasil belajar.

Seiring dengan kandungan Undang-Undang sistem pendidikan tersebut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 yang tertuang dalam Bab II pasal 2 tentang pendidikan luar sekolah yang sekarang menjadi pendidikan nonformal menyebutkan, 'melayani dan membina' warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang, memiliki pengetahuan dan keterampilan guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupan, serta "memenuhi" kebutuhan belajar masyarakat. Ketiga jalur penyelenggaraan pendidikan tersebut memberikan kejelasan kepada kita bahwa tanggungjawab pendidikan adalah bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Aksi yang menjawab tuntutan pengembangan kualitas sumber daya manusia ini khususnya telah dilakukan melalui berbagai bentuk penyelenggaraan pendidikan, pendidikan formal atau lazim disebut pendidikan persekolahan, pendidikan luar

sekolah yang sekarang kembali disebut dengan pendidikan nonformal serta pendidikan informal.

Pendidikan luar sekolah yang lebih dikenal sebagai bagian kecil dari program pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional sebenarnya dalam masa pembangunan sekarang ini telah berkembang. Program pendidikan luar sekolah telah dilaksanakan tidak hanya oleh Departemen Pendidikan Nasional tetapi hampir semua departemen menyelenggarakan pendidikan tersebut, baik diperuntukkan bagi pengadaan tenaga kerja baru, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam setiap lembaga maupun peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat yang diselenggarakan di berbagai pusat pendidikan dan latihan pada setiap lembaga pemerintah, dan ini adalah model penyelenggaraan pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal.

Dukungan pemerintah dalam menyediakan anggaran untuk sektor pendidikan luar sekolah khususnya cukup besar yang meskipun alokasinya tersebar dalam setiap departemen baik yang ditujukan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun sebagai upaya pemberdayaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh institusi-institusi tersebut melalui berbagai bentuk pendidikan profesi dan pendidikan kedinasan yang jalurnya adalah jalur pendidikan nonformal.

Sehubungan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai bentuk aksi pendidikan lebih khususnya pada sektor pendidikan nonformal atau pendidikan luar sekolah ini direkrut data dari beberapa departemen khususnya dinas-dinas di daerah Propinsi Bengkulu. Sebagai wilayah yang akan dijadikan daerah penelitian oleh penulis telah melaksanakan banyak program pendidikan dan pelatihan, namun bagaimanakah perencanaan program tersebut setiap tahunnya, adakah basis

pengkajian efesiensi penyelenggaraan pendidikan nonformal khususnya pendidikan keterampilan fungsional dijadikan acuan utama dalam sebuah perencanaan.

Dalam konteks lain, Ari Ginanjar seorang pakar yang menghembuskan nafas *emosional spiritual question* (ESQ) yang dalam kontek bahasannya adalah mengembalikan semua bentuk pemberdayaan sumber daya manusia kepada fitrahnya dengan pola berfikir melingkar sebagaimana yang tersirat dalam asmaul husna, memberikan landasan pijak atas dasar rukun Islam dan rukun Iman, suatu gagasan yang tepat untuk memberikan basis kepada pendidikan saat ini, dimana kondisi bangsa yang sedang dalam krisis moral sehingga memporak porandakan nilai-nilai kehidupan bangsa. Nilai spiritual akan memberikan dasar yang kokoh dalam pembangunan sumber daya manusia.

Hasil pengalaman lapangan mendiskripsikan beberapa program pendidikan nonformal seperti pemberantasan tiga buta yaitu buta aksara dan angka, buta bahasa Indonesia, serta buta pengetahuan dasar. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Iqra ayat pertama yang artinya "bacalah" menganjurkan agar manusia belajar, memberikan makna bahwa kita memang harus membebaskan diri dari kebodohan. "Menuntut ilmu" identik maknanya dengan belajar di manapun berada, kapanpun adanya sepanjang hayat dikandung badan tidak ada kata berhenti untuk belajar. Belajar pada intinya yakni membentuk sumber daya manusia berkualitas.

Program pendidikan *life skill* sebagai upaya pemberdayaan sumber daya manusia untuk dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup warga belajarnya, namun kegiatan ini akan terasa rapuh bila tidak dilandasi oleh nilai-nilai spiritual yang kokoh.

Demikian halnya dengan berbagai macam jenis pelatihan yang dilaksanakan oleh hampir semua dinas / departemen dalam rangka peningkatan kualitas kmerja, menciptakan ahli-ahli teknologi, ahli ekonomi dan sebagainya, tetap tidak akan kokoh dan tidak akan memiliki kebermaknaan yang hakiki bila tidak dilandasi oleh nilai spiritual. Dari beberapa asumsi tersebut dipandang perlu kiranya memberikan perhatian dalam penyusunan setiap rencana pengembangan sumber daya manusia melalui program pendidikan umumnya dan khususnya pendidikan nonformal adalah memiliki basis nilai spiritual.

Program pendidikan nonformal sebagai upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia yang diprogramkan oleh hampir semua lembaga pemerintahan, dalam perencanaannya adalah masing-masing dengan pola dan corak model masing-masing belum nampak ada satu model acuan yang dapat dijadikan rujukan bagi semua penyelenggara pendidikan nonformal. Pemenuhan kebutuhan pendidikan yang lebih dikategorikan sebagai alternatif pemecahan kesenjangan pengetahuan dan keterampilan dalam dunia kerja, masih akan tampak semu bila tidak dilandasi oleh suatu model perencanaan yang jitu.

Kolaborasi antar departemen atau dinas dalam mengimplementasikan perencanaan pengembangan sumber daya manusia era otonomi daerah belum dianggap hal yang penting, sehingga ada kesan bahwa peningkatan sumber daya manusia sebagai bagian dari program kerja masing-masing institusi, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional telah memberikan arah tentang pendidikan nonformal, sebuah pertanyaan mengapa belum ada koordinasi dan kolaborasi dalam perencanaan peningkatan sumber daya manusia melalui program pendidikan nonformal?



Di lain pihak kita merasakan bahwa program pendidikan nonformal tampak belum dapat menyentuh pada semua lapisan masyarakat, masih ada anggapan bahwa pendidikan nonformal adalah pendidikan sampingan.

Munculnya persepsi bahwa pendidikan adalah sekolah masih terlampau lekat di kalangan masyarakat, sedangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan itu terbagi dalam tiga jalur yakni formal, nonformal dan informal. Pendidikan nonformal adalah pelengkap, pengganti dari pendidikan formal. Perencanaan pengembangan sumber daya manusia harus menyentuh kesemua lapisan masyarakat, masyarakat berdaya, masyarakat berkualitas akan melahirkan masyarakat yang sejahtera.

Oleh sebab itu dipandang perlu untuk mendapatkan perhatian prioritas bagi pemerintah daerah khususnya akan sisi pendidikan nonformal. Di sisi lain sebuah program pemberdayaan melalui kegiatan pendidikan memerlukan basis yang jelas yang memiliki kebermaknaan yang benar dan teruji kehandalannya. Kurangnya perhatian terhadap efisiensi penyelenggaraan yang diawali dari sebuah perencanaan dalam pengembangan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan keterampilan fungsional. Efisiensi penyelenggaraan pendidikan keterampilan fungsional tersebut diperlukan adanya perencanaan yang secara konservatif.

Perencanaan yang secara konservatif dapat dijadikan acuan karena memiliki nilai-nilai analisa strategik, dengan memasukkan unsur-unsur kolaboratif, partisipati, dan analisis kompetitif untuk menjamin nilai jual dari produk perencanaan tersebut. Mengembalikan pengkajian efektifitas dan efisiensi program pendidikan nonformal kepada proses awalnya adalah dengan menjadikan penerapan model perencanaan strategik yang konservatif dan bermakna serta mamiliki nilai jual yang tinggi.

B. Identifikasi Masalah

Bertolak dari latar belakang permasalahan di atas, diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Belum adanya acuan model perencanaan pengembangan sumber daya manusia melalui program pendidikan nonformal oleh setiap lembaga penyelenggara.
- Kolaborasi antara institusi rendah, sangat diperlukan dalam perencanaan pengembangan sumber daya manusia utamanya sebagai implementasi otonomi daerah.
- Program pendidikan nonformal dirasakan belum mendapatkan prioritas dari pemerintah daerah sehingga belum dapat menyentuh semua lapisan masyarakat
- Perencanaan pengembangan sumber daya manusia melalui program pendidikan nonformal belum mendapatkan mendapat prioritas pemerintah daerah untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia di semua sektor atau lembaga baik swasta maupun lembaga pemerintah.
- Belum adanya perhatian yang khusus untuk memberikan arah lebih bermakna dan sebagai basis dalam penyusunan perencanaan pengembangan kualitas sumber daya manusia, sehingga program-program pendidikan dalam upaya pemberdayaan sumber daya manusia memiliki kekuatan secara bermakna pada masing-masing individu.
- Belum dimilikinya acuan model penerapan perencanaan strategik yang kolaboratif dan partisipatif serta memiliki nilai kompetitif dalam penyelenggaraan program pendidikan nonformal untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam pendidikan keterampilan fungsional.



Perumusan Masalah

Dari banyak permasalahan tersebut di atas, penulis membatasi pada permasalahan pokok yang dipandang perlu akan adanya perhatian khusus untuk memberikan arah dan sebagai basis dalam penerapan penyusunan perencanaan strategik yang kolaboratif dan partisipatif serta kompetitif dalam program pendidikan nonformal khususnya pendidikan keterampilan fungsional untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Sehingga program-program pendidikan nonformal seperti halnya pendidikan *life skills*, pendidikan keterampilan fungsional yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat, dapat memiliki tingkat kebermaknaan dalam kehidupan dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Permasalahan-permasalahan ini kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah yang menjadi focus penelitian.

Isu sentral yang menjadi focus penelitian ini adalah :

“Bagaimanakah model perencanaan strategik dalam pendidikan keterampilan fungsional pertanian?”. Fokus penelitian tersebut dapat dirinci dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah program pendidikan keterampilan fungsional pertanian yang diselenggarakan oleh masyarakat tani dan telah berjalan saat ini meliputi ;
 - a. Komponen program pendidikan keterampilan fungsional pertanian ?
 - b. Proses pendidikan keterampilan fungsional pertanian ?
 - c. Tujuan program pendidikan keterampilan fungsional pertanian ?
2. Bagaimana fungsi-fungsi pengelolaan pendidikan keterampilan fungsional pertanian yang dikelola oleh masyarakat tani saat ini, meliputi :
 - a. Bagaimanakah fungsi perencanaan ?

- b. Bagaimanakah fungsi pelaksanaan ?
 - c. Bagaimanakah fungsi evaluasi ?
 - d. Bagaimakah fungsi pemantauan ?
3. Bagaimanakah konseptual model perencanaan stratejik dalam pendidikan keterampilan fungsional pertanian ?
 4. Bagaimana model perencanaan stratejik yang kolaboratif, partisipatif dan kompetitif dalam pendidikan keterampilan fungsional pertanian?
 - a. Bagaimanakah pelaksanaan ujicoba penerapan model perencanaan stratejik ?
 - b. Bagaimanakah langkah-langkah penerapan model perencanaan stratejik ?
 - c. Bagaimanakah pelaksanaan kolaborasi dan partisipasinya ?
 - d. Bagaimanakah model perencanaan stratejik yang direkomendasikan?
 - e. Bagaimanakah keunggulan dan kelemahan model perencanaan stratejik dalam pendidikan keterampilan fungsional pertanian?

D. Definisi Operasional

Beberapa istilah yang digunakan dalam pertanyaan penelitian ini dipandang perlu untuk didefinisikan, untuk menghindari kesalahan pemaknaan penelitian ini. Definisi operasional diawal pengkajian permasalahan ini antara lain meliputi :

1. Pendidikan Keterampilan Fungsional

Semua jenis aktivitas pendidikan yang dilaksanakan di luar sistem persekolahan, diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Berfungsi mengembangkan potensi peserta belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Dilaksanakan meliputi pendidikan kecakapan hidup (pendidikan life skill), pendidikan anak usia dini, pendidikan kepermudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Termasuk didalamnya pendidikan kedinasan yang dilaksanakan melalui jalur pendidikan nonformal.

Pendidikan keterampilan fungsional adalah kegiatan pendidikan yang diperuntukkan dalam peningkatan kecakapan hidup warga belajar dalam rangka meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya, kegiatan ini dapat berlangsung dalam kelompok masyarakat itu sendiri yang dikelompokkan atas dasar rekrutmen kebutuhan dan minat warga belajar yang dikolaborasikan dengan sumber daya penunjang kegiatan pendidikan tersebut. Dalam hal ini pendidikan keterampilan fungsional yang dimaksudkan untuk penelitian adalah pendidikan keterampilan fungsional bidang pertanian yang dikelola oleh kelompok masyarakat tani.

2. Fungsi Pengelolaan Pendidikan Keterampilan Fungsional

Fungsi-fungsi pengelolaan pendidikan keterampilan fungsional dalam konteks penelitian ini adalah meliputi fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, fungsi evaluasi dan fungsi pemantauan. Sehingga keempat fungsi tersebut memberikan gambaran tentang pengelolaan pendidikan keterampilan fungsional secara menyeluruh dari awal perencanaan hingga pada monitoring keluaran program pendidikan tersebut.

3. Perencanaan Stratejik

Perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang (Sudjana, 2000). Perencanaan ini dilakukan di tingkat meso sesuai dengan wilayah penelitian adalah Propinsi. Perencanaan Stratejik (strategic planning) adalah sebuah proses perencanaan yang menggabungkan Long-Range planning dengan environmental scanning menjadi enam langkah pokok yakni : pengkajian lingkungan (environmental scanning), penilaian informasi (evaluating/ranking), peramalan (forecasting), penentuan tujuan (goal setting), pelaksanaan (implementing), dan pemantauan (monitoring). (Sudjana : 2000)

Perencanaan stratejik dalam penelitian ini adalah suatu model penerapan perencanaan stratejik yang kolaboratif dan partisipatif dalam pendidikan keterampilan fungsional bidang pertanian dikalangan masyarakat tani.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Bertolak dari rumusan permasalahan dan pertanyaan penelitian, menjadi tujuan dalam penelitian ini disusun menjadi tujuan secara umum dan tujuan khusus, yakni; Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menemukan cara yang tepat dalam membuat suatu bentuk model perencanaan stratejik yang kolaboratif dan partisipatif serta kompetitif dalam pendidikan keterampilan fungsional pertanian.

Secara khusus tujuan tersebut diperinci :

1. Mendiskripsikan program pendidikan keterampilan fungsional pertanian yang telah berjalan saat ini meliputi ;
 - a. Komponen program pendidikan keterampilan fungsional pertanian
 - b. Proses pendidikan keterampilan fungsional pertanian
 - c. Tujuan program pendidikan keterampilan fungsional pertanian

2. Mendiskripsikan fungsi-fungsi pengelolaan pendidikan keterampilan fungsional pertanian, meliputi :
 - a. fungsi perencanaan
 - b. fungsi pelaksanaan
 - c. fungsi evaluasi
 - d. fungsi pemantauan

3. Mendiskripsikan konseptual model perencanaan stratejik dalam pendidikan keterampilan fungsional pertanian.

4. Menemukan dan mendiskripsikan model perencanaan stratejik yang kolaboratif dan partisipatif serta kompetitif dalam pendidikan keterampilan fungsional pertanian, meliputi :
 - a. diskripsi pelaksanaan ujicoba model perencanaan stratejik
 - b. langkah-langkah penerapan model perencanaan stratejik
 - c. pelaksanaan kolaborasi dan partisipasi, dan analisa kompetitif
 - d. model perencanaan stratejik yang direkomendasikan
 - e. keunggulan dan kelemahan model perencanaan stratejik dalam pendidikan keterampilan fungsional bidang pertanian ?

b. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi yaitu secara teoritik sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan manfaat secara praktis, sebagai bagian dari masukan-masukan berharga untuk para praktisi dalam kancan pemberdayaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan nonformal.

Penelitian ini bila dilihat secara kontribusi teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu pendidikan pemberdayaan sumber daya manusia melalui konsep-konsep pendidikan nonformal dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga benar-benar menjadi masyarakat yang gemar belajar sepanjang hayat dalam kontek yang memiliki kebenaran dan kebermaknaan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat membuka jalan pada kajian teori pendekatan pembangunan sumber daya manusia yang didasarkan pada azas kebutuhan yang relevan baik terhadap perkembangan sosial budaya maupun percepatan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mempunyai dampak terhadap kualitas sumber daya manusia yang dimiliki bangsa, khususnya daerah yang telah diberikan hak otonomi.

Disamping itu secara praktis penelitian ini bertujuan memberikan masukan yang berharga dan membantu memberikan arah dalam penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia di daerah. Serta memiliki acuan model penyusunan perencanaan stratejik melalui program-program pendidikan nonformal baik oleh lembaga pemerintahan maupun lembaga-lembaga swasta yang memiliki ketertarikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan nonformal, antara lain :

1. Tentang pengkajian kembali terhadap model perencanaan program-program berbagai bentuk dan jenis satuan pendidikan nonformal untuk pengembangan sumber daya manusia.
2. Efektifitas penerapan perencanaan stratejik yang kolaboratif dan partisipatif serta memiliki kemampuan kompetitif untuk pendidikan keterampilan fungsional diberbagai bidang keterampilan yang dikelola oleh masyarakat. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki daerah.

